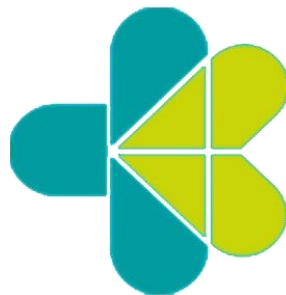


**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
BALAI LITBANG KESEHATAN BANJARNEGARA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara Tahun 2023, sebagai penjabaran dari rencana aktivitas pada Tahun 2023 dan sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Satuan Kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Dokumen RKT ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Kerja Kementerian Kesehatan, untuk memberikan arah perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kegiatan selama tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2023, dengan harapan mampu memberikan kontribusi bagi upaya Kementerian Kesehatan dalam rangka merencanakan pembangunan kesehatan sekaligus menciptakan *good governance* khususnya di lingkungan Balai Litbangkes Banjarnegara.

Akhir kata, semoga dengan adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Litbangkes Banjarnegara sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien.

Banjarnegara, Januari 2023
Kepala Balai Litbangkes
Banjarnegara



Muh Faozan, S.K.M., M.P.H.
NIP 196903301992031002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. TUJUAN PENULISAN.....	3
D. ORGANISASI.....	3
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022	7
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	7
B. REKOMENDASI HASIL EVALUASI TAHUN 2022	7
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	8
A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023.....	8
B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023.....	11
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	16
BAB IV RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN	19
BAB V PENUTUP	21

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 adalah membangun manusia yang berkualitas dan berdaya saing (Sehat, Cerdas, Adaptif, Kreatif, Inovatif, Terampil dan Bermartabat), yang di dalamnya termuat program Kementerian Kesehatan termasuk Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes). Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 51 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Balai Litbangkes Banjarnegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan dengan keunggulan pengendalian leptospirosis, serta mempunyai fungsi melakukan penyusunan rencana dan program, dan anggaran kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan kajian di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu, melaksanakan pengembangan metoda, model dan teknologi di bidang kesehatan dan keunggulan tertentu, melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan berbasis pelayanan, mengelola sarana penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan diseminasi, publikasi dan advokasi hasil-hasil penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan kerja sama dan jaringan informasi penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rekomendasi kebijakan dan pengembangan kesehatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta melaksanakan ketatausahaan Balai.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah turunan dari Rencana Aksi Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dan Rencana Strategis Kemenkes 2020-2024 yang berjangka waktu satu tahun. RKT memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kerjanya.

RKT Balai Litbang kesehatan Banjarnegara Tahun 2023 ini digunakan sebagai dasar penetapan Pagu Definitif dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian Lembaga (RKA-KL) Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2023.

B. LANDASAN HUKUM

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
8. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
9. Undang-undang No. 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
10. Undang-undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Litbang Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Litbang Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
13. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
14. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
15. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
16. Perpres No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17. Permenristek No. 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaporan Kekayaan Intelektual, Hasil Kegiatan Litbang dan Pengelolaannya
18. Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
20. Kepmenkes No. 267 Tahun 2010 Tentang Penetapan Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat
21. Permenkes No. 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
22. Kepmenkes No. 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025
23. Kepmenkes No. 374 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
24. Keputusan Kepala LANRI No. 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

C. TUJUAN PENULISAN

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk :

1. Memberikan panduan dan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, dan evaluasi pencapaian *output* kegiatan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara.
2. Memberikan dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan dukungan manajemen di Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara.

D. ORGANISASI

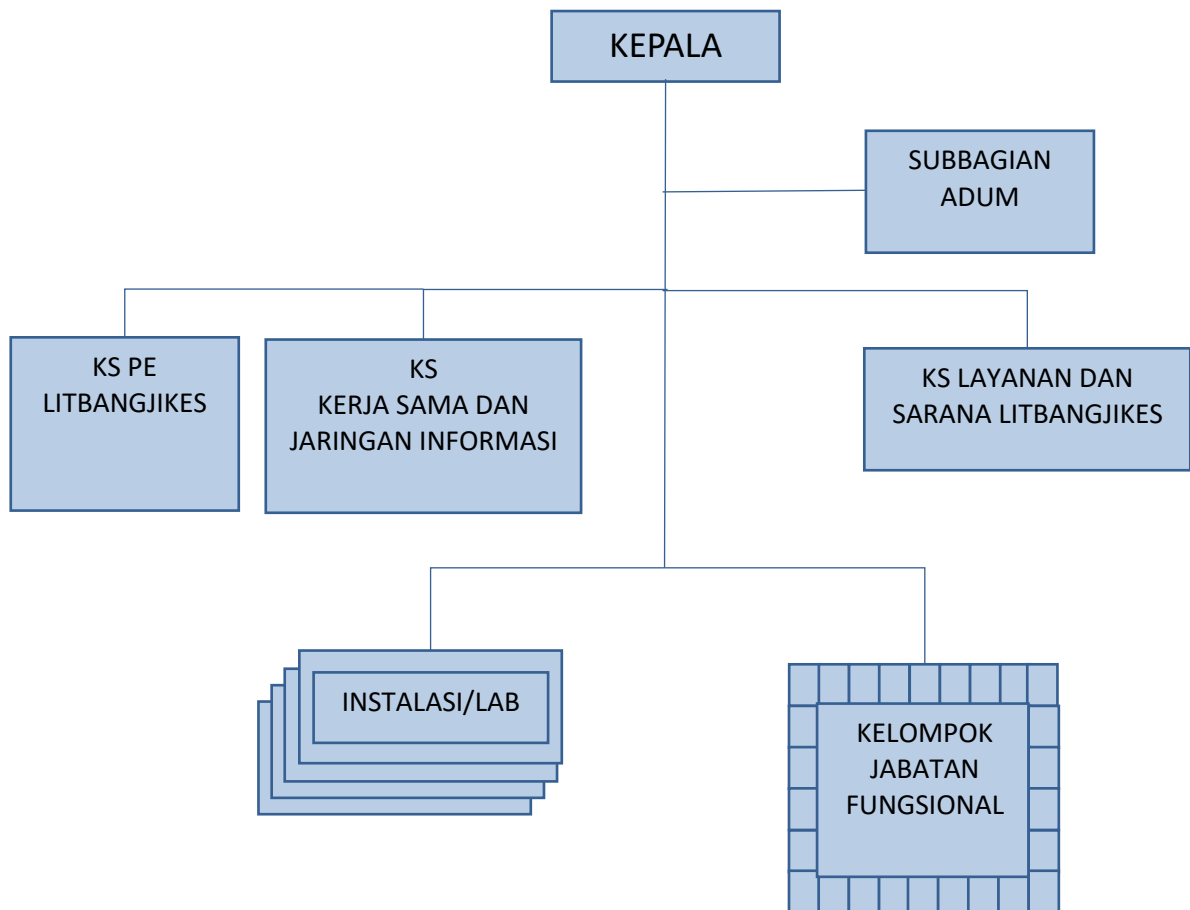
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 51 Tahun 2020 Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balai Litbangkes) Banjarnegara merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan (saat ini menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan). Balai Litbangkes Banjarnegara berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Secara administratif Balai Litbangkes Banjarnegara dibina oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, sedangkan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat yang bersesuaian.

Adapun struktur organisasi Balai Litbangkes Banjarnegara menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2020 terdiri dari:

1. Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara

2. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.
3. Koordinator Kelompok Substansi Program dan Evaluasi Litbangjikes
Kelompok Substansi Program dan Evaluasi Litbangjikes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
4. Koordinator Kelompok Substansi Kerja Sama dan Jaringan Informasi
Kelompok Substansi Kerja Sama dan Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama dan kemitraan, diseminasi, publikasi, advokasi, dan pengelolaan jaringan informasi ilmiah penelitian dan pengembangan kesehatan serta perpustakaan.
5. Koordinator Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Litbangjikes
Kelompok Substansi Layanan dan Sarana Litbangjikes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian, kajian, pengembangan metoda, model, teknologi, bimbingan teknis, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan berbasis pelayanan serta pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan kesehatan.
6. Laboratorium / Instalasi
Laboratorium/Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pengendalian kesehatan yang dipimpin oleh seorang Koordinator/Kepala dalam jabatan nonstruktural.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Litkayasa serta Jabatan Fungsional lain.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.51 tahun 2020



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Litbangkes Banjarnegara Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tahun 2020

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Litbangkes Banjarnegara ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan Penulisan
- D. Organisasi
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

- A. Capaian Kinerja Tahun 2022
- B. Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

BAB III. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

A. Indikator Kinerja Tahun 2023

B. Rencana Kegiatan Tahun 2023

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

BAB IV. RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara diukur berdasarkan indikator seperti yang ditargetkan pada dokumen Penetapan Kinerja (Tapja). Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Berikut ini adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara tahun 2022:

Tabel 1 Indikator Kinerja Kegiatan Kebijakan Kesehatan Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Capaian	%
Meningkatnya kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50%	60%	120

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja berupa persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK adalah sebesar 60% yang berarti telah melebihi target yang diperjanjikan yaitu sebesar 50%.

B. REKOMENDASI HASIL EVALUASI TAHUN 2022

Rekomendasi hasil evaluasi kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera terbit payung hukum tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT yang jelas mengatur tugas dan fungsi Satker. Sehingga dalam menjalankan kegiatannya Satker memiliki landasan hukum dan *output* ataupun *outcome* yang sesuai dengan tugas dan fungsinya tersebut.
2. Perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik sehingga tidak terlalu banyak blokir, penyesuaian atau revisi dalam tahun berjalan.
3. Perlunya koordinasi yang lebih baik antar pegawai maupun antar lembaga untuk meningkatkan efektifitas dan mengeliminasi inefisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Perlunya otomatisasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kinerja
5. Mengutamakan peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sebagai modal utama menghadapi tantangan kedepan.

BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2023

A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

Sasaran kinerja sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Aksi Kegiatan Balai Litbangkes Banjarnegara tahun 2020-2024 adalah meningkatnya kebijakan sistem ketahanan Kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti dengan indikator persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh BKPK. Dari indikator kinerja tersebut maka disusunlah Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara tahun 2023 yang merupakan komitmen dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023 antara Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara sebagai pihak yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagai pihak yang memberi amanah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan diketahui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Selengkapnya sasaran dan indikator kinerja dalam perjanjian kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2023

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

1. Sasaran kinerja : Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti

Indikator kinerja: persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK.

Definisi operasional: persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK.

Cara perhitungan: jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang Kesehatan pada tahun berjalan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK dibagi dengan total jumlah kebijakan atau

regulasi yang dikeluarkan daerah di bidang Kesehatan pada tahun berjalan dikali 100.

Analisa penetapan target: Dengan mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024 salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan yaitu Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK dengan target 80%.

2. Sasaran kinerja: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

a. Indikator kinerja: Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Definisi operasional: Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari :

- 1) Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA-K/L secara tahunan
- 2) Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan
- 3) Aspek konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program

Cara perhitungan: Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK-RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan


Analisa penetapan target: Dengan mengacu pada Capaian Nilai kinerja penganggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan tahun sebelumnya (2022) sebesar 92,36 diharapkan capaian Nilai kinerja penganggaran tahun 2023 mengalami peningkatan namun masih terjangkau mengingat kondisi organisasi yang masih dalam masa transisi sehingga ditetapkan target nilai kinerja penganggaran tahun 2023 adalah sebesar 93.

b. Indikator kinerja: Persentase Realisasi Anggaran BKPK

Definisi operasional: Persentase realisasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Balai Litbangkes Banjarnegara

Cara perhitungan: jumlah total realisasi anggaran Balai Litbangkes Banjarnegara pada tahun berjalan dibagi dengan total alokasi anggaran (pagu akhir apabila terdapat revisi) pada tahun tersebut.

Analisa penetapan target: Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Balai Litbangkes Banjarnegara dengan Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan ditetapkan target sebesar 95%.



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
BANJARNEGARA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Jastal, SKM., M.Si
Jabatan : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Banjarnegara
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wirabrata, Apt
Jabatan : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua, Dr. Wirabrata, Apt	Pihak Pertama  Jastal, SKM., M.Si
--	---

Mengetahui
Kepala,

Syarifah Liza Munira

Gambar 2 Pernyataan Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara Tahun 2023

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
BANJARNEGARA**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	1. Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93
		3. Persentase Realisasi Anggaran BKPK	95

Kegiatan	Anggaran
1. Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp 3.160.561.000
2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp 9.690.871.000
Total Anggaran DIPA Balai Litbangkes Banjarmasin	Rp 12.851.432.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,

Dr. Wirabrata, Apt

Pihak Pertama

Jestil, SKM., M.Si

Mengetahui
Kepala,

Syarifah Liza Munira

Gambar 3 Formulir Perjanjian Kinerja Balai Litbangkes Banjarmasin Tahun 2023

B. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 Balai Litbang Kesehatan Banjarmasin melaksanakan dua program kegiatan yaitu Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Program Dukungan Manajemen.

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan dibagi menjadi satu kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan dengan Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) Fasilitasi dan Pembinaan

Kelompok Masyarakat [*Base Line*]. KRO tersebut terbagi dalam lima rincian *output* sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Kronis di Puskesmas (UPT)
2. Akreditasi Laboratorium
3. Pengadaan Reagen
4. Pengadaan Peralatan Laboratorium
5. Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)

Sedangkan Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu Kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan 5 klasifikasi rincian *output* sebagai berikut:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi [*Base Line*]
2. Layanan Dukungan Manajemen Internal [*Base Line*] dengan rincian *output*:
 - a. Layanan BMN
 - b. Layanan Hubungan Masyarakat
 - c. Layanan Umum
 - d. Layanan Data dan Informasi
 - e. Layanan Perkantoran
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal [*Base Line*] dengan rincian *output* Layanan Sarana Internal
4. Layanan Manajemen SDM Internal [*Base Line*] dengan rincian *output* Layanan Manajemen SDM
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal [*Base Line*] dengan rincian *output*:
 - a. Layanan Perencanaan dan Penganggaran
 - b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - c. Layanan Manajemen Keuangan
 - d. Layanan Reformasi Kinerja
 - e. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

Masing-masing kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kelompok substansi dan sub bagian administrasi umum sesuai tugas dan fungsinya dengan penanggung jawab kegiatan di dalam kelompok substansi dan sub bagian administrasi umum tersebut ditunjuk sesuai dengan SK penempatan pegawai tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 3 Kegiatan dan Pelaksana/Penanggungjawab Kegiatan di Balai Litbangkes
Banjarnegara Tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Penanggungjawab	
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	KS/Subbag	Penanggungjawab
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		
6834.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]		
6834.BDD.008	KRO: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Kronis di Puskesmas (UPT)		
701	RO: Analisis Kebijakan	Yansarlitbangji	
A	Analisis kebijakan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan Wanita Usia Subur di Prov DIY		
B	Analisis kebijakan program pengendalian penyakit kronis pada fasyankes di wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Tengah		
702	RO: Advokasi. Negosiasi dan Pendampingan Kebijakan	KSJI	Rahmawati
A	Advokasi		
B	Negosiasi		
	C Pendampingan Kebijakan		
6834.BDD.015	KRO: Akreditasi Laboratorium		
701	RO: Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Satker UPT	Yansarlitbangji	Ihda Zuyina
702	RO: Pelaksanaan Kalibrasi peralatan laboratorium. Sertifikasi		Siwi Setyabudi
6834.BDD.016	KRO: Pengadaan Reagen		
701	RO: Pelaksanaan Pengadaan reagen pemeriksaan Satker UPT	Yansarlitbangji	Isya Fikria
6834.BDD.017	KRO: Pengadaan Peralatan Laboratorium		
701	RO: Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Satker UPT	Adum	Yuswanto/ Wisu Erlangga
6834.BDD.021	KRO: Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)		
702	RO: Penyakit Menular dan Faktor Resiko	Yansarlitbangji	
A	Survei Kewaspadaan Peningkatan Kasus Penyakit		Corry Laura
B	Surveilans Vektor dan Reservoir Penyakit Menular		Nova Pramestuti
C	Surveilans Penyakit Menular		Zumrotus Sholichah
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]		
6797.CAN.951	KRO: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Penanggungjawab	
706	RO: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker UPT	Adum	Yuswanto/ Wisa Erlangga
A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi		
6797.EBA.956	KRO: Layanan BMN		
706	RO: Pengelolaan BMN Satker UPT	Adum	Margono
6797.EBA.958	KRO: Layanan Hubungan Masyarakat		
704	RO: Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Satker UPT	KSJI	Rahma/Nur Sholihatin
710	RO: Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT		Nur Sholihatin/ Somsiah
716	RO: Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Satker UPT		
A	Pengelolaan Dokumentasi. Data dan Informasi		Yunan Singgih
B	Pengelolaan Perpustakaan		Somsiah/ Yunan Singgih
6797.EBA.962	KRO: Layanan Umum		
710	RO: Pengelolaan Kerumahtanggaan Satker UPT	Adum	Eti Supeni/ Pisesa Restu
6797.EBA.994	KRO: Layanan Perkantoran		
001	RO: Gaji dan Tunjangan	Adum	Margono
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		
002	RO: Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
A	Kebutuhan sehari hari perkantoran		Heni Herawati
B	Biaya Satpam/ Pengaman. cleaning service. sopir. pramubakti		Margono/ Yuswanto
C	Langganan Daya dan Jasa		Eti Supeni/ Umar Yusuf
D	Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat		Puji Astuti
E	Pemeliharaan gedung/ bangunan		Wisa Erlangga/ Sumawoto
F	Pemeliharaan Sarana Kantor		Margono/ Isdiyanto/ Umar Yusuf
G	Pemeliharaan kendaraan bermotor		Sumarwoto/ Isdiyanto/ Wisa
H	Honor terkait operasional satker		Yuswanto
I	Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh		Endang Setiyani
J	Pakaian Dinas. Toga. Pakaian Kerja		Wisa Erlangga
K	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/ Koordinasi/Kunker		Puji Astuti
L	Manajemen Laboratorium		Yansarlit
M	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	Adum	Andri Wahyu P/ Tri Setiyowati
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]		
6797.EBB.951	KRO: Layanan Sarana Internal		

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	Penanggungjawab	
713	RO: Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Satker UPT	Adum	Yuswanto/ Wisa Erlangga
A	<i>Sarana Perlengkapan Kantor</i>		
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]		
6797.EBC.954	KRO: Layanan Manajemen SDM		
711	RO: Pengembangan Kompetensi SDM Satker UPT	Adum	Andri Wahyu Prasetyo
A	<i>Peningkatan Kapasitas SDM</i>		
716	RO: Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Satker UPT		Tri Setiyowati
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]		
6797.EBD.952	KRO: Layanan Perencanaan dan Penggangan		
706	RO: Penyusunan Perencanaan Satker UPT	PE	Asnan Prastawa/ Somsiah
A	<i>Menyusun Perencanaan Satker</i>		
711	RO: Penyusunan Anggaran Satker UPT		Asnan Prastawa/ Somsiah
A	<i>Menyusun Anggaran</i>		
B	<i>Mengikuti Pertemuan Lintas Program/Sektor</i>		
6797.EBD.953	KRO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi		
706	RO: Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satker UPT	PE	Siwi Setyabudi/ Anna Susanti
A	<i>Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi</i>		
B	<i>Pertemuan Lintas Program/Lintas Sektor</i>		
6797.EBD.955	KRO: Layanan Manajemen Keuangan		
706	RO: Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satker UPT	Adum	Eti Supeni/ Somsiah
A	<i>Layanan Keuangan dan Perbendaharaan</i>		
B	<i>Melaksanakan Pertemuan UAPPA-W</i>		
C	<i>Pertemuan Lintas Program /Lintas Sektor</i>		
717	RO: Optimalisasi PNBPN Satker UPT		Puji Astuti
A	<i>Pengelolaan PNBPN</i>		
6797.EBD.961	KRO: Layanan Reformasi Kinerja		
703	RO: Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Satker UPT	Adum	Tri Setiyowati/ Heni Herawati
6797.EBD.974	KRO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		
708	RO: Penatausahaan Kearsipan Satker UPT	Adum	Pisesa Restu
A	<i>Melaksanakan Kearsipan</i>		

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023, rencana anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara berdasarkan pagu indikatif adalah sebesar Rp.12.851.432.000,-. Alokasi anggaran untuk tiap kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Rencana Anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	TARGET VOLUME	PAGU
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		3.160.561.000
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		3.160.561.000
6834.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	5.0 Kelompok	3.160.561.000
6834.BDD.008	KRO: Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Kronis di Puskesmas (UPT)	1.0 Kelompok Masyarakat	300.000.000
701	RO: Analisis Kebijakan		200.000.000
A	Analisis kebijakan pemberian tablet tambah darah pada remaja putri dan Wanita Usia Subur di Prov DIY		105.441.000
B	Analisis kebijakan program pengendalian penyakit kronis pada fasyankes di wilayah perkotaan dan pedesaan di Jawa Tengah		94.559.000
702	RO: Advokasi, Negosiasi dan Pendampingan Kebijakan		100.000.000
A	Advokasi		73.580.000
B	Negosiasi		18.420.000
C	Pendampingan Kebijakan		8.000.000
6834.BDD.015	KRO: Akreditasi Laboratorium	1.0 Kelompok Masyarakat	101.670.000
701	RO: Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Satker UPT		52.000.000
702	RO: Pelaksanaan Kalibrasi peralatan laboratorium. Sertifikasi		49.670.000
6834.BDD.016	KRO: Pengadaan Reagen	1.0 Kelompok Masyarakat	481.975.000
701	RO: Pelaksanaan Pengadaan reagen pemeriksaan Satker UPT		481.975.000
6834.BDD.017	KRO: Pengadaan Peralatan Laboratorium	1.0 Kelompok Masyarakat	218.100.000
701	RO: Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Satker UPT		218.100.000
6834.BDD.021	KRO: Surveilans Kesehatan Masyarakat (UPT)	1.0 Kelompok Masyarakat	2.058.816.000
702	RO: Penyakit Menular dan Faktor Resiko		2.058.816.000
A	Survei Kewaspadaan Peningkatan Kasus Penyakit		499.762.000
B	Surveilans Vektor dan Reservoir Penyakit Menular		374.000.000
C	Surveilans Penyakit Menular		1.185.054.000
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen		9.690.871.000
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		9.690.871.000
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[Base Line]	9.0 Unit	166.200.000
6797.CAN.951	KRO: Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	9.0 Unit	166.200.000
706	RO: Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Satker UPT		166.200.000
A	Alat Pengolah Data dan Komunikasi		166.200.000
6797.EBA.956	KRO: Layanan BMN	1.0 Layanan	16.535.000
706	RO: Pengelolaan BMN Satker UPT		16.535.000
6797.EBA.958	KRO: Layanan Hubungan Masyarakat	1.0 Layanan	125.135.000
704	RO: Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama Satker UPT		41.220.000
710	RO: Pengelolaan hubungan Masyarakat Satker UPT		62.255.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	TARGET VOLUME	PAGU
716	RO: Pengelolaan dokumentasi perpustakaan dan publikasi Satker UPT		21.660.000
A	Pengelolaan Dokumentasi, Data dan Informasi		15.174.000
B	Pengelolaan Perpustakaan		6.486.000
6797.EBA.962	KRO: Layanan Umum	1.0 Layanan	54.178.000
710	RO: Pengelolaan Kerumahantagaan Satker UPT		54.178.000
A	TANPA SUB KOMPONEN		54.178.000
6797.EBA.994	KRO: Layanan Perkantoran	2.0 Layanan	8.793.015.000
001	RO: Gaji dan Tunjangan		6.508.636.000
A	Pembayaran gaji dan tunjangan		6.508.636.000
002	RO: Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.284.379.000
A	Kebutuhan sehari hari perkantoran		68.850.000
B	Biaya Satpam/ Pengaman. cleaning service. sopir. pramubakti		700.596.000
C	Langganan Daya dan Jasa		310.764.000
D	Jasa Pos/ Giro/ Sertifikat		9.600.000
E	Pemeliharaan gedung/ bangunan		266.098.000
F	Pemeliharaan Sarana Kantor		90.940.000
G	Pemeliharaan kendaraan bermotor		76.880.000
H	Honor terkait operasional satker		102.776.000
I	Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh		36.480.000
J	Pakaian Dinas. Toga. Pakaian Kerja		23.463.000
K	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Konsultasi/ Koordinasi/Kunker		93.840.000
L	Manajemen Laboratorium		357.842.000
M	Pemeriksaan Kesehatan Pegawai		146.250.000
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	11 Unit	77.300.000
6797.EBB.951	KRO: Layanan Sarana Internal	11 Unit	77.300.000
713	RO: Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Satker UPT		77.300.000
A	Sarana Perlengkapan Kantor		77.300.000
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]	45 Orang	172.112.000
6797.EBC.954	KRO: Layanan Manajemen SDM	45 Orang	172.112.000
711	RO: Pengembangan Kompetensi SDM Satker UPT		141.870.000
A	Peningkatan Kapasitas SDM		141.870.000
716	RO: Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur Satker UPT		30.242.000
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]		286.396.000
6797.EBD.952	KRO: Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.0 Dokumen	72.690.000
706	RO: Penyusunan Perencanaan Satker UPT		14.970.000
A	Menyusun Perencanaan Satker		14.970.000
711	RO: Penyusunan Anggaran Satker UPT		57.720.000
A	Menyusun Anggaran		1.500.000
B	Mengikuti Pertemuan Lintas Program/Sektor		56.220.000
6797.EBD.953	KRO: Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen	39.000.000
706	RO: Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi Satker UPT		39.000.000
A	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi		1.610.000
B	Pertemuan Lintas Program/Lintas Sektor		37.390.000
6797.EBD.955	KRO: Layanan Manajemen Keuangan	1.0 Dokumen	124.286.000
706	RO: Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satker UPT		70.655.000
A	Layanan Keuangan dan Perbendaharaan		2.971.000
B	Melaksanakan Pertemuan UAPPA-W		8.624.000
C	Pertemuan Lintas Program /Lintas Sektor		59.060.000
717	RO: Optimalisasi PNB Satker UPT		53.631.000
A	Pengelolaan PNB		53.631.000
6797.EBD.961	KRO: Layanan Reformasi Kinerja	1.0 Dokumen	35.840.000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	TARGET VOLUME	PAGU
703	RO: Pengelolaan RB dan WBK/WBBM Satker UPT		35.840.000
6797.EBD.974	KRO: Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.0 Dokumen	14.580.000
708	RO: Penatausahaan Kearsipan Satker UPT		14.580.000
A	Melaksanakan Kearsipan		4.600.000

BAB IV RENCANA EVALUASI KINERJA TAHUNAN

Dalam mendapatkan capaian target kinerja yang maksimal sesuai dengan perencanaan kinerja tahunan yang sudah dibuat, di perlukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi hasil, dampak maupun keberlanjutannya. Balai Litbangkes Banjarnegara dalam melakukan monitoring dan evaluasi sudah mempunyai mekanisme seperti :

1. Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi Bulanan

Evaluasi kinerja bulanan Balai Litbangkes Banjarnegara dilakukan sekali tiap bulan dengan cara mengumpulkan data dari masing-masing Subbag dan/atau Kelompok Substansi serta Penanggungjawab Kegiatan sesuai dengan format yang sudah diberikan melalui. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui realisasi progres kegiatan yang sudah dilakukan serapan besaran anggaran, kendala/hambatan yang dihadapi dan realisasi fisiknya dibandingkan dengan target, realisasi dana dan fisik masing-masing *output*. Data tersebut kemudian di input dalam e monev Bappenas, Smart DJA, dan e *performance*.

2. Rapat pertemuan laporan triwulan

Laporan triwulan dilakukan setiap 3 bulan sekali, sehingga terdapat 4 laporan triwulan selama setahun. Balai Litbangkes Banjarnegara melakukan rapat pertemuan laporan triwulan secara internal untuk melakukan sinkronisasi data dari monitoring dan evaluasi bulanan kepada Subbag dan/atau Kelompok Substansi serta PJ Kegiatan secara langsung. Hasil dari rapat internal tersebut kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan sinkronisasi Laporan Triwulan di tingkat Badan Litbangkes. Penyelenggaraan laporan triwulan dikoordinasi oleh Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Materi laporan triwulan Balai Litbangkes Banjarnegara berasal dari SAI dan akumulasi laporan monev bulanan. Laporan triwulan memberikan informasi antara kesesuaian capaian kinerja dan serapan anggaran satker dengan target yang telah ditetapkan tiap triwulan (capaian target berdasarkan Rencana Pelaksanaan Kegiatan, RPK). Data tersebut juga di input dalam e-monev Bappenas, Smart DJA, dan e-*performance*.

3. Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja

Penyusunan laporan tahunan dan laporan kinerja Balai Litbangkes dimulai dari tingkat internal satker. Penyusunan laporan diawali dengan pengumpulan data berupa laporan kegiatan tahunan dari tiap Subbag dan/atau Kelompok Substansi serta PJ Kegiatan. Setelah data terkumpul maka akan dikompilasi dan disusun menjadi *outline* Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Balai Litbang Kesehatan

Banjarnegara yang kemudian menjadi data masukan dalam pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja di tingkat BKPK. Penyelenggaraan pertemuan laporan tahunan dan laporan kinerja difasilitasi oleh Tim Kerja Evapor, Sekretariat BKPK. Laporan tahunan memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian program BKPK meliputi capaian semua kegiatan yang dilaksanakan oleh satker. Laporan tahunan ini merangkum pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, berupa kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan laporan kinerja memberikan gambaran pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja kegiatan dalam perjanjian kinerja Balai Litbangkes Banjarnegara, terobosan dan inovasi, serta penghargaan yang dicapai.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis bagi Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara dalam mencapai tujuan program Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia pada DIPA dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2022 adalah penyusunan Rencana Kinerja Tahunan agar rencana kerja dan anggaran Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara Tahun 2023 dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsi masing-masing elemen organisasi.

Semoga dokumen ini dapat berguna khususnya bagi pelaksanaan kegiatan di Balai Litbang Kesehatan Banjarnegara serta program kesehatan secara luas demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional.